

# ANALYSIS IMPEMENTATION OF PSAK 101 PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS IN SHARIA AT BMT UMMAT MANDIRI BALIKPAPAN

Oleh: Utamy Julianti dan Mardatillah

Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Madani Balikpapan

## *Abstract:*

Nowdays, BMT not just finance entitas but growing as shariah finance entitas. Its mean BMT have more power to growing. Aspecially implementation accounting standars in sharia. In fact not many finance sharia institution using a PSAK. The purpose of this study was to determine wheater accounting standars play a role in the management of the financial statements BMT Ummat Mandiri Balikpapan.

The study used a qualitative descriptive research. For data collection is done by techiques of documentation and interview techniques. The data used is BMT Ummat Mandiri Fincancial Statement consisting of balance sheet, income statement and cash flow statement with the 2011-2013. This study uses two variables consisting of PSAK 101 independent variables and the dependent variable is the financial statements. This study was done by analyzing the financial statements of the BMT Ummat Mandiri whether in accordance with PSAK 101 or not.

The result of this study show the presentation of financial statements BMT Ummat Mandiri complete the take because it does not present all the components of the financial statements are in PSAK 101, but for the presentation of the balance sheet, income statement and cash flow statement presented in accordance with PSAK 101. Method of recording recognition of the financial statement have been prepared on BMT Ummat Mandiri accrual basic, for the calculation of income available for the result are presented using the cash basis.

**Keyword :** *BMT Ummat Mandiri, Implemetation PSAK 101, finance shariah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup pesat. Ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah selain bank syariah, seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan tersebut juga berperan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara, salah satunya BMT. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT sendiri bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peranan yang cukup tinggi bagi perkembangan usaha menengah ke bawah di wilayah perkampungan.

Saat ini perkembangan BMT di Indonesia sangat pesat, sebagai lembaga keuangan yang melandaskan kinerjanya pada sistem syariah mencoba untuk menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan bermualah yang benar seperti sistem yang diterapkan pada bank-bank umum syariah lainnya, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan cukup tinggi dari masyarakat. Demikian halnya juga yang terjadi pada lembaga setaraf BMT. Melalui mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang relatif sederhana, memudahkan bagi para pengelola BMT untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana yang mereka miliki kepada para anggota. Salah satu alasan mengapa semakin banyak masyarakat yang memakai produk BMT adalah menghindari sistem bunga yang diharamkan karena mengandung unsur riba. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, lembaga keuangan syariah harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi pihak bank maupun nasabah. Oleh karena itu, layanan yang diberikan seperti produk harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selain itu sebagai pendukung dalam melaksanakan usahanya, BMT menerapkan akuntansi syariah dalam mengerjakan pelaporan keuangannya. Dalam pengerjaan laporan keuangan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menyajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan, namun realitanya tidak banyak diterapkan. Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ; Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang berisi tentang tujuan akuntansi keuangan, asumsi dasar atas dasar sistem pencatatan dasar akrual, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan unsur laporan keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

PSAK bukan hanya sebagai acuan transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan syariah. Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003 yang kemudian di perbaharui dengan PSAK 101-106 yang disahkan pada 27 Juni 2007 dan mulai berlakunya pada 1 Januari 2008. Perbedaan antara PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101-106 adalah pemberlakuannya bukan hanya ditujukan pada entitas bank syariah saja tetapi untuk entitas syariah dan konvensional. Adapun alasan yang mendasari adanya pembaharuan PSAK ini karena istilah atau pernyataan dalam PSAK No. 59 dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, keputusan tersebut telah dilakukan *review* yang mendalam atas *draft* PSAK oleh Dewan Syariah Nasional MUI, tujuan yang hendak dicapai Ikatan Akuntan Indonesia adalah bahwa laporan keuangan yang telah di *review* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan syariah lainnya.

Transaksi keuangan sangat diperlukan dalam bank syariah untuk mengungkapkan laporan atau informasi kepada pihak yang memerlukan baik dari pihak bank sendiri maupun nasabah, oleh karena itu pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah harus sesuai dan berpedoman pada Standar Akuntansi Syariah salah satunya dari

PSAK 101-106. Dalam PSAK 101-106 mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. PSAK yang secara khusus mengatur pengelolaan keuangan lembaga keuangan syariah adalah PSAK No. 101 yaitu tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Meski telah ditentukan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditentukan, masih saja terdapat beberapa lembaga keuangan yang pada nyatanya tidak menerapkan standar akuntansi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan yang berkala dari pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Keuangan berperan dalam pengelolaan laporan keuangan BMT Ummat Mandiri?
2. Sejauh mana PSAK No. 101 diterapkan pada laporan keuangan BMT Ummat Mandiri?

### **Laporan Keuangan Syariah**

Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKS) pada tahun 2007. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah (Rizal, 2009:80).

KDPPLKS bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain (Rizal, 2009:81):

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar.
2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun

sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku umum.

4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual,

melainkan menggunakan dasar kas (Rizal, 2009:85).

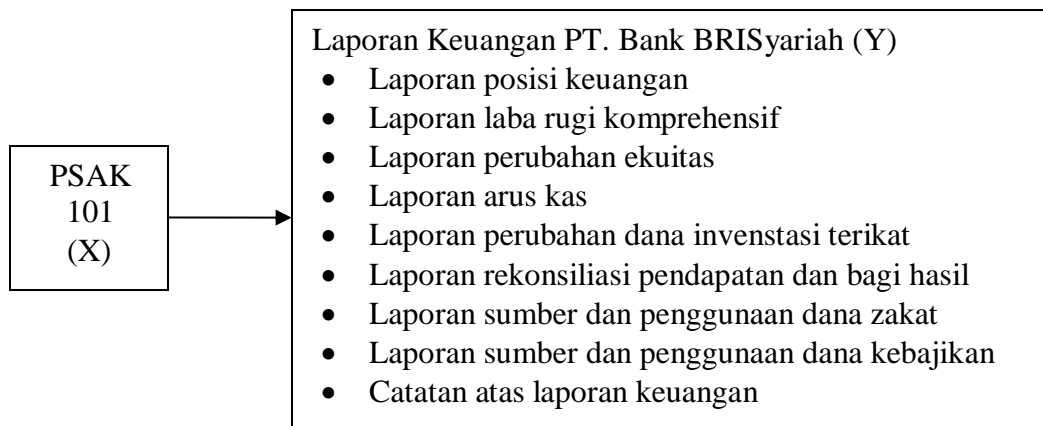
Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini (Rizal, 2009:86):

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

### PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"

Penyajian laporan keuangan bank syariah telah diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Oleh karena itu laporan keuangan harus memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan bank syariah. Kekurangan perhatian PSAK dan PAPSI dalam masalah syariah juga terdapat dalam hal fungsi laporan keuangan memfasilitasi DPS untuk memeriksa dana nonhalal dengan dana *qardh*. Penggabungan dapat menimbulkan persoalan syariah berupa tercampurnya yang *haq* dan yang *bathil*. Ketiadaan pemisahan akan menyebabkan kurangnya perhatian untuk mengupayakan penghilangan dana nonhalal dimasa yang akan datang (Muhammad, 2005:228).

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## Penelitian Terdahulu

Diyanah (2008), meneliti tentang Pelaporan Keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan interview/wawancara. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai dengan PSAK 59, hanya saja dari laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia kurang detail dikarenakan tidak adanya transaksi. Pengakuan akun laporan keuangan antara PSAK 59 dengan BPRS Margirizki Bahagia menggunakan *accrual basis*, kecuali pada pendapatan bagi hasil yang menggunakan *cash basis*. Untuk pengukuran akun laporan keuangan antara PSAK 59 dengan BPRS Margirizki Bahagia menggunakan *historical cost*, kecuali pada pendapatan bagi hasil yaitu menggunakan *current cost*. Untuk semua pengungkapan laporan keuangan antara PSAK 59 dan BPRS Margirizki Bahagia adalah sama.

Sholihah (2009), meneliti tentang penerapan PSAK 101-106 terhadap laporan keuangan pada KJKS An Nisa Kab. Pemasang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penerapan PSAK 101 pada KJKS An Nisa kurang lengkap dikarenakan hanya menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana *qordhul hasan*.

Holy (2012), meneliti tentang penerapan penyajian laporan keuangan BMT Mitra Bersama Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa BMT Mitra Bersama hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi, sehingga penyajian laporan keuangan BMT Mitra Bersama belum sesuai dengan ketentuan laporan keuangan pada PSAK 101.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang suatu hal yang diteliti. Menurut Husein (2012:22)

metode deskriptif dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiono, 2009:14).

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sehingga lebih memudahkan dan menunjang penelitian ini. Dibutuhkan data yang relevan dalam penyusunan penelitian ini agar dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

### 1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah mengenai sumber acuan khusus seperti penemuan atau hasil penelitian yang sudah atau sedang dilakukan (jurnal dan skripsi). Adapun data yang digunakan berupa PSAK 101 serta laporan keuangan BMT Ummat Mandiri

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Wawancara yang dilakukan secara berencana kepada pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Metode ini digunakan penulis untuk mewawancarai bagian keuangan BMT Ummat Mandiri untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai laporan keuangan pada BMT Ummat Mandiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subyek yang diteliti. Penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita. Metode analisis data deskriptif kualitatif meliputi 4 komponen:

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data adalah sebuah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan suatu kegiatan penelitian.
2. Reduksi data  
Reduksi data dapat diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terkumpul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang di kode, mana yang dibuang mana yang meringkas sejumlah bagaian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang itu semuanya merupakan penelitian-penelitian analisis.
3. Penyajian data  
Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian akan dituangkan dalam bentuk grafik, jaringan atau bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu, mudah diraih dan dipahami. Sebagaimana dengan reduksi data, penciptaan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis, ini merupakan bagian dari analisis.
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi  
Dari permulaan pengumpulan data penulis akan memulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab yang memungkinkan serta proposal. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Maka yang muncul dari data juga harus diuji kebenarannya, kekohonannya, yaitu merupakan validitasnya.

Adapun penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, utuh dan integratif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya. Model analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Model ini dipilih atas dasar karena penelitian ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana peranan pelaksanaan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan BMT Ummat Mandiri.

Analisis kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan BMT Ummat Mandiri. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK 101 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 101 maka penyajian akun tersebut dinyatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan PSAK 101 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian. Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data  
Penulis mengumpulkan data yang akan dianalisis nantinya berupa laporan keuangan BMT Ummat Mandiri yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitias, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang digunakan adalah periode tahun 2011-2013 dan PSAK 101 revisi 2011.
2. Reduksi data  
Laporan keuangan BMT Ummat Mandiri sebagai data yang telah dikumpulkan akan diambil beberapa komponen yang diperlukan saja sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada PSAK 101 kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan mengidentifikasi format laporan keuangan BMT Ummat Mandiri berdasarkan PSAK 101.
3. Penyajian Data  
Penyajian data pada penelitian ini dapat berupa bagan atau tabel yang disajikan secara jelas agar mudah dipahami maksudnya. Pada penelitian ini akan disajikan format laporan

keuangan BMT Ummat Mandiri periode tahun 2011-2013.

4. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Dari data-data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan BMT Ummat Mandiri dan PSAK 101 maka penulis akan mulai menganalisis laporan keuangan tersebut sampai akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Objek penelitian pada penelitian ini adalah BMT Ummat Mandiri. Data yang digunakan adalah laporan keuangan BMT Ummat Mandiri periode tahun 2011-2013 dan PSAK 101 revisi tahun 2011. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan BMT Ummat Mandiri telah sesuai dengan PSAK 101 atau tidak.

Implementasi PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah terhadap penyajian laporan keuangan BMT Ummat Mandiri yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan laporan arus kas. Dari indikator tersebut dapat dilihat bagaimana implementasi PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan pada BMT Ummat telah sesuai dengan PSAK 101 dari segi transaksinya maupun pencatatannya. BMT Ummat Mandiri menyajikan pos tambahan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan kebutuhan penyajian laporan keuangannya. Selain itu terdapat beberapa pos yang ada pada PSAK 101 tidak disajikan pada laporan posisi keuangan BMT Ummat Mandiri dikarenakan tidak adanya transaksi tersebut. Pada laporan posisi keuangan BMT Ummat Mandiri tidak terdapat giro pada bank lain, inventasi pada surat berharga, untuk piutang hanya terdapat piutang murabahah dan piutang lain-lain, tidak terdapat tagihan dan liabilitas akseptasi, aset *ijarah*, aset *istishna*, untuk hutang hanya terdapat hutang pajak dan hutang dana pihak ketiga, tidak terdapat pembiayaan yang diterima, estimasi kerugian komitmen dan

kontigensi, selain itu BMT Ummat Mandiri tidak menyajikan dan syirkah temporer. Tidak semua pos maupun komponen dalam laporan posisi keuangan BMT Ummat Mandiri sama persis dengan PSAK 101 karena hal ini disesuaikan dengan kebutuhan laporan keuangan BMT tersebut. Dalam pencatatan laporan posisi keuangan BMT Ummat Mandiri telah mencakup beberapa pos-pos yang terdapat pada PSAK 101. BMT Ummat Mandiri menyajikan kas, piutang, persediaan, inventasi, hutang, aset keuangan, aset tetap, liabilitas serta modal. Pos tersebut telah sesuai seperti yang terdapat pada PSAK 101. Sama dengan pada penelitian sebelumnya oleh Diyanah (2008), Sholihah (2009) dan Holy (2012) juga menyatakan bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada tempat penelitian sesuai yang ditentukan PSAK 101.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif BMT Ummat Mandiri telah sesuai dengan PSAK 101. Laporan laba rugi pada BMT Ummat Mandiri menyajikan pendapatan yang berasal dari bagi hasil, margin/mark up, jasa adm, hibah. Pendapatan lain-lain serta pendapatan non operasional. Untuk biaya terdiri dari beban bagi hasil, beban operasional, beban gaji, beban administrasi, beban penyusutan serta beban operasional yang terdiri dari zakat dan pajak. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. BMT Ummat Mandiri telah menyajikan bagi hasil untuk pemilik dana. Untuk perhitungan laba neto yang diperoleh dari besarnya pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi beban dan pajak. Namun terdapat pos-pos yang ada pada PSAK 101 tidak disajikan pada laporan laba rugi BMT Ummat Mandiri dikarenakan tidak terdapat transaksi tersebut. Adapun yang tidak disajikan pada laporan laba rugi BMT Ummat Mandiri seperti pendapatan dari jual beli dan pendapatan sewa.

3. Laporan Arus Kas

Untuk penyajian Laporan arus pada BMT Ummat Mandiri sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas BMT Ummat Mandiri disajikan setiap periode dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, dan pendanaan saja,

laporan arus kas BMT Ummat Mandiri menggunakan metode langsung, dalam penyusunannya menggunakan buku besar kas dan menggolongkan menjadi beberapa jenis kelompok utama penerimaan maupun pengeluaran berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan yang mempengaruhi jumlah kas. Laporan arus kas BMT Ummat Mandiri tidak terdapat aktivitas investasi yang dirincikan. Tidak semua akun sama persis digunakan pada PSAK 2 digunakan pada laporan arus kas yang ada pada BMT Ummat Mandiri. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Sama halnya pada penelitian terdahulu oleh Diyanah (2008) laporan arus kas pada BPRS Margirizki Bahagia mencakup aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2009) pada KJKS An Nisa pada laporan arus kas mencakup aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan disusun menggunakan metode langsung.

## KESIMPULAN

BMT Ummat Mandiri dalam pencatatan laporan dan pelaporan akuntansinya belum mencakup semua komponen yang ada pada PSAK 101. Namun pada beberapa komponen laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PSAK 101. Sesuai dengan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi PSAK 101 oleh BMT sudah sesuai namun ada beberapa bagian yang tidak dicatat dikarenakan tidak terdapat transaksi tersebut sehingga tidak dapat analisis. BMT Ummat Mandiri menyajikan laporan keuangan secara teratur agar mudah dipahami oleh pengguna laporan tersebut. Adapun penyajian laporan keuangan pada BMT Ummat Mandiri seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan transaksi BMT tersebut.
2. Sejauh ini penerapannya belum optimal yang dilakukan oleh BMT, sehingga implementasi PSAK 101 belum dirasakan oleh BMT tersebut.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut, antara lain:

1. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif juga untuk menganalisis pengaruh dari penerapan PSAK 101 terhadap laporan keuangan yang diteliti.
2. Mengaplikasikan pada penyajian laporan keuangannya dan mengoptimalkan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan yang digunakan, serta disesuaikan dengan PSAK dan ketentuan lain yang biasa dipergunakan lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diyanah, Sari. A.I. 2008. Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 59. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Holy. 2012. Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 101. *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Machmud, Amir., dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sholihah, Siti. 2009. Analisis Penerapan PSAK  
101-106 Dalam Akuntansi Syariah. *Skripsi*.

Semarang: Institut Agama Islam Walisongo.